

TENSI SEKTARIANISME DAN TANTANGAN DEMOKRASI DI TIMUR TENGAH PASCA ARAB SPRING

Sainul Rahman

Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Kajian Timur Tengah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*) Email: sainulrahman001@gmail.com

ABSTRACT

The Arab Spring wave in the beginning of 2011 that hit Middle Eastern countries, started from Tunisia, Egypt, Libya, Yemen, and Syria, which still continue to this day, is a symbol of the fall of authoritarian and repressive Arab regimes, as well as a symbol of the struggle of Arabian people who want great changes in various fields such as economic, social, and democratic political system. After eight years, the Arab Spring still has many problems, Middle Eastern countries still trapped in conflict and civil war. The transition of democracy that hoped is not going well, trapped in sectarian interests: tribes, religions, streams (madzhab), and political groups. Sectarianism has become one of the causes of instability and colored the politic dynamics in the region. In fact, it socially and historically has multiple roots over a long period of time in the Middle East. This paper seeks to read the history and dynamics of sectarian conflict, as well as the process of democratic transition: between opportunities and challenges, and the realization of democracy in the region after the Arab Spring.

Keywords: *Sectarianism, Democracy, Arab Spring, Middle East.*

ABSTRAK

Gelombang Arab Spring pada awal 2011 yang melanda negara-negara Timur Tengah, dimulai dari Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah yang masih berlanjut hingga kini, adalah sebuah simbol jatuhnya rezim-rezim Arab yang otoriter dan represif, dan juga sebagai simbol perjuangan rakyat Arab yang menginginkan adanya perubahan besar dalam berbagai bidang, ekonomi, sosial, sistem politik terbuka dan demokratis. Setelah delapan tahun semenjak bergulirnya, Arab Spring masih menyisakan banyak problem, negara-negara Timur Tengah masih terpuruk, terjebak dalam konflik dan perang saudara. Transisi demokrasi yang dicita-citakan tidak berjalan dengan baik, tersandera oleh kepentingan-kepentingan sektarian: suku, agama, mazhab dan kelompok politik. Sektarianisme menjadi salah satu penyebab instabilitas dan telah mewarnai dinamika politik di kawasan Timur Tengah. secara sosio-historis sektarianisme di Timur Tengah memiliki akar yang berlapis-lapis dalam kurun waktu yang panjang. Tulisan ini berusaha untuk membaca sejarah dan dinamika konflik sektarianisme, proses transisi demokrasi: antara peluang dan tantangan, dan realisasi demokrasi di Timur Tengah pasca Arab Spring.

Kata Kunci: *Sektarianisme, Demokrasi, Arab Spring, Timur Tengah.*

PENDAHULUAN

Kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang sangat penting dan strategis, terutama jika dilihat dari aspek ekonomi, politik, keamanan, dan ideologi. Cadangan minyak dan gas yang banyak dikandung, serta letaknya yang berada di persimpangan tiga

benua, Asia, Afrika, dan Eropa, membuat kawasan Timur Tengah semakin penting dan strategis. Pada masa lampau, kekuatan-kekuatan besar dunia seperti kerajaan Persia, Turki Ustmaniyah, dan Prancis masa Napoleon, berusaha untuk menjadi penguasa di wilayah ini. Selain itu,

kawasan Timur Tengah menjadi tempat lahirnya peradaban-peradaban besar sejak dahulu seperti Iran, Irak, Mesir, dan Palestina¹.

Timur Tengah juga diketahui oleh khalayak ramai sebagai rahim dari lahirnya agama-agama besar dunia: Islam, Kristen dan Yahudi, sekaligus sebagai tempat bersemainya mazhab-mazhab dan sekte-sekte keagamaan. Sehingga secara umum, seringkali media masa dan para analis menggunakan perspektif agama, mazhab, dan sekte dalam memetakan dan menganalisis konflik-konflik yang terjadi di sana. Pemetaan ini bukan tanpa dasar dan alasan yang jelas, faktanya bahwa konflik-konflik yang terjadi seringkali mencuat atas dasar sentimen agama, mazhab dan sekte. Timur Tengah hingga saat ini masih identik dengan ketegangan, perang dan konflik, baik konflik antar-intra suku, agama, mazhab, sekte dan politik. Sektarianisme merupakan masalah besar dan menjadi salah satu penyebab instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Sektarianisme bahkan kian berkembang dan meruyak di Timur Tengah sejak bermulanya transisi ke demokrasi. Seiring dengan menguatnya Arab Spring, yang mula-mula terjadi di Tunisia pada desember 2010 dan kemudian menyebar ke berbagai negara-negara di dunia Arab, Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, dan Suriah hingga kini, sektarianisme juga akhirnya mewarnai pergumulan politik. Meskipun gelombang demokrasi telah berjalan cukup lama akan tetapi belum

juga terlihat adanya tanda-tanda menyusutnya sektarianisme agama, mazhab, sekte, sosial, dan politik di Timur Tengah².

Abdul Hakim dalam “*Konflik Sektarian dan Perkembangan Pemikiran Islam*” melihat bahwa awal dari konflik sektarianisme di dunia Arab, khususnya antara Sunni dan Syi’ah, terjadi setelah peristiwa *tahkim* (perundingan) pada perang *siffin*. Perang *siffin* adalah perang saudara di antara umat Islam dari generasi sahabat yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib sebagai *khalifah* dan Muawiyah bin Abi Sufyan selaku gubernur Syam yang melakukan pemberontakan. Peristiwa Tahkim akhirnya melahirkan Khawarij, kelompok radikal pertama dalam rahim Islam, mereka adalah kelompok yang tidak puas dan kecewa hasil *tahkim*, lalu memerangi Ali dan umat Islam lain yang tidak sependapat dengan mereka. Perang Siffin dan peristiwa Tahkim telah membuat umat Islam terpolarisasi tajam ke dalam kelompok-kelompok: Sunni, Syi’ah, dan Khawarij yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan radikal dan ekstrim seperti Alqaedah, Boko Haram, dan ISIS sekarang ini³.

Ahmad sahide juga melihat hal yang sama bahwa konflik sektarianisme khususnya Sunni dan Syi’ah memiliki akar historis yang cukup panjang. Lebih jauh lagi, benih-benihnya telah dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad.

² Azyumardi Azra, *Transformasi politik Islam: radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*, Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group bekerja sama Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), p. 273.

³ Abdul Hakim, ‘Konflik Sektarian Dan Perkembangan Pemikiran Dalam Islam’, *SAFINA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1.1 (2016), 56–60 (p. 57).

¹ M. Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, Cet. 1 (Jakarta : Ujungberung, Bandung: Mizan ; Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2007), pp. V–XXIV.

Konflik ini pada awalnya adalah konflik politik, hal ini terkait tentang suksesi kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad. Namun demikian konflik ini terus berlanjut dan terseret dalam konflik akidah atau mazhab. Konflik Sunni-Syi'ah memiliki dampak yang sangat besar dalam mewarnai perkembangan peradaban dunia Islam kontemporer. Keberadaannya juga telah mewarnai prahara politik di Timur Tengah selama bergulirnya gelombang Arab Spring sejak awal tahun 2011. Konflik Sunni-Syi'ah di kawasan Timur Tengah memiliki dua bentuk universal: konflik antar kelompok masyarakat, baik itu antar rezim Sunni dan kelompok masyarakat yang Syi'ah maupun sebaliknya, dan konflik antar negara⁴.

Kontestasi politik dan distribusi kekuasaan di negara-negara Timur Tengah selalu diwarnai sektarianisme. Dalam konteks Timur Tengah, dinamika sektarianisme masih sangat kental dan terlihat jelas. Selain kontestasi agama, seperti Islam dan Yahudi yang terjadi antara Palestina dan Israel, sektarianisme antar mazhab Sunni dan Syiah terjadi di beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki penduduk Sunni dan Syiah. Konflik sektarianisme Sunni-Syiah telah melibatkan dua negara berkekuatan besar dan sekaligus sebagai kiblat. Keduanya yaitu Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi direpresentasikan sebagai kekuatan dan kiblat Sunni sedangkan Iran menjadi kiblat dan pusat dari kekuatan Syiah. Konflik sektarianisme Sunni dan Syiah telah mempengaruhi

sistem dan arah politik di kawasan Timur Tengah.

Sektarianisme telah memberikan pengaruh besar pada kontestasi dan arah politik di kawasan Timur Tengah. Tidak sampai di situ saja, konflik sektarianisme juga menjadi salah satu tantangan dan penghambat transisi demokrasi di Timur Tengah. Padahal, Perjuangan demokrasi di Timur Tengah telah melewati proses panjang dengan pengorbanan besar. Demokrasi bagi rakyat Timur Tengah adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Perjuangan demokrasi ini muncul karena adanya kebutuhan yang mendesak atas hak-hak rakyat yang terabaikan oleh rezim yang otoriter. Sehingga rakyat memutuskan untuk menolak pemerintahan individu, pemerintahan militer dan monarki. Rakyat menginginkan kedaulatan, mereka juga ingin berpartisipasi dalam menentukan masa depan bangsa dan negaranya yang lebih demokratis, adil, makmur dan sejahtera⁵.

Lalu kemudian, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana perjalanan demokrasi di Timur Tengah, mengapa hingga saat ini, demokrasi masih berjalan setengah hati. Mengapa sektarianisme menjadi masalah dan tantangan demokrasi di Timur Tengah, dan seberapa besar peluang demokrasi di Timur Tengah? Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan historis dengan metode diskriptif-analisis. Penulis juga akan menggunakan teori-teori demokrasi dalam menganalisis

⁴ Ahmad Sahide, 'Konflik Syi'ah-Sunni Pasca-The Arab Spring', *Jurnal Kawistara*, 3.3 (2013), pp. 315–19.

⁵ Ibnu Burdah, *Menuju Dunia Baru Arab: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, Dan Kekuasaan*, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), pp. 26–27.

perkembangan, tantangan, dan peluang demokrasi di Timur Tengah.

Demokrasi menurut Hans Kelsen adalah sebuah proses berkelanjutan menuju kesempurnaan. Demokrasi lahir dari adanya ide kebebasan dalam benak manusia. Proses demokrasi diawali dengan adanya kompromi yang sehat antara kehendak mayoritas dan minoritas yang terimplementasi dalam parlemen dan lembaga-lembaga politik lain. tidak ada paksaan dalam beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan pers, hak memilih, ide persamaan, sistem pemilihan yang meliputi lembaga pemilihan, hak pilih, dan partai politik⁶.

PEMBAHASAN

a. Arab spring dan Perjuangan Demokrasi di Timur Tengah

Arab Spring atau Musim Semi Arab merupakan gelombang gerakan rakyat akar rumput yang terdiri dari berbagai profesi yang menginginkan sebuah perubahan besar yang dapat membawa mereka pada sebuah situasi hidup yang lebih baik. Mengingat situasi dan kondisi negara-negara mereka yang semakin tidak menentu; ekonomi melemah, angka kemiskinan yang terus meningkat, pengangguran yang semakin banyak, ketimpangan dan kesenjangan sosial semakin lebar, kebebasan hidup dan politik yang dibelenggu oleh rezim-rezim yang berkuasa. Arab Spring juga dapat dikatakan sebagai revolusi yang menginginkan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, sebuah sistem yang terbuka, transparan,

berasaskan pada kebebasan dan keadilan. Situasi ini dapat dimaklumi bila melihat keadaan para pemimpin negara-negara arab yang memimpin dan menjabat dengan kurun waktu yang cukup lama, puluhan tahun. Hal ini membuat para rezim semakin kuat dan cenderung diktator dan sewenang-wenang dalam memimpin.

Arab Spring atau Musim Semi Arab merupakan kosa kata politi baru dalam kamus politik Timur Tengah. Arab Spring menjadi sebuah simbol dari jatuhnya para pemimpin otoriter di negara-negara Timur Tengah, terutama negara-negara Arab seperti Tunisia, Mesir, Libya dan Yaman. Hal ini juga dianggap sebagai sebuah momentum dan peluang berharga untuk menuju kebangkitan dan perubahan besar di kawasan Timur Tengah, termasuk lahirnya sebuah sistem politik dan pemerintahan demokratis, yang terbuka dan berkeadilan sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah⁷.

Gelombang *Arab Spring* yang telah menyapu sebagian besar negara-negara di Timur Tengah pertama kali terjadi di Tunisia. Hal ini dipicu oleh pembakaran diri yang dilakukan oleh seorang anak muda, dengan berlatar belakang sarjana, yang berprofesi sebagai pedagang buah. Muhammad Bouazizi melakukan aksi nekatnya dalam keadaan frustrasi yang mendalam atas sikap aparat yang telah merampas dagangan yang merupakan mata pencahariannya dan tidak kunjung mengembalikannya. Aksi nekat itu

⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cet. VI (Bandung: Nusa Media, 2011), pp. 402–16.

⁷ Ahmad Sahide, *Gejolak Politik Timur Tengah (Dinamika, Konflik dan Harapan)*, cet. I (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017), p. 136.

sebagai respon dan protes keras terhadap perilaku sewenang-wenang dan tidak berkeadilan yang dilakukan oleh aparat dan pemerintah lokal di bawah rezim otoriter Zaenal Abidin bin Ali.

Muhammad Bouazizi bukan seorang ideolog, bukan juga pemimpin gerakan ataupun orator ulung yang hendak membakar diri demi sebuah cita-cita agung. Aksi yang ia lakukan diyakini sebagai reaksi individual atas keadaan yang dialami oleh dirinya sendiri. Namun, ternyata aksi nekadnya telah menggantikan tugas-tugas yang gagal dilakukan oleh para ideolog, para pemimpin gerakan, dan para orator di negara-negara Arab selama ini. Selama sekitar empat dekade ini, semua ideolog besar, pemimpin-pemimpin gerakan dan para orator oposan yang muncul di hampir seluruh negara Arab dengan berbagai latar belakang spektrum ideologi dan agendanya, telah gagal melakukan perubahan terhadap kondisi politik represif, monopoli ekonomi di sekitar penguasa, ketimpangan ekonomi di masyarakat dan ketidakadilan sosial⁸.

Muhammad Bouazizi berhasil melakukan tugas besar menjatuhkan rezim otoriter yang telah berkuasa cukup lama di negaranya, Tunisia. Aksi bakar diri (*Self Immolation*) Bouazizi mendapat respon yang sangat luas melalui pemberitaan media, baik nasional maupun internasional, hal ini diikuti dengan aksi demonstrasi yang menggoncang kekuasaan rezim otoriter Tunisia. Aksi bakar diri Bouazizi dan demonstrasi besar-besaran yang terus berlanjut dipenjuru kota akhirnya

⁸ Ibnu Burdah, *Islam Kontemporer: Revolusi dan Demokrasi*, cet. I (Malang: Intrans Publishing, 2014), pp. 27–28.

memaksa rezim Ben Ali mundur dari kekuasaannya yang selama ini dibangun di atas tangan besi⁹. Bouazizi telah berhasil meruntuhkan mitos kegagalan dalam menjatuhkan rezim-rezim diktator, kematiannya justru telah menepis ketakutan dan menyulut keberanian rakyat untuk melawan penguasa-penguasa diktator yang telah lalim dan menindas mereka.

Arab Spring terus berlanjut dan berubah seolah menjadi virus yang menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru negara-negara di Timur Tengah. Tidak lama setelah Tunisia, Mesir juga mengalami gejolak yang sama. Keberhasilan rakyat Tunisia menjatuhkan rezim otoriter Bin Ali, nampaknya mengilhami rakyat Mesir untuk melakukan hal yang sama. Rakyat mesir memiliki masalah yang sama yaitu kemiskinan dan pengangguran yang merajalela, serta karakter kepemimpinan otoriter husni mubarak yang telah berkuasa puluhan tahun¹⁰. Demonstrasi bergulir besar-besaran yang terjadi diseluruh penjuru Mesir dengan satu tujuan bersama yaitu menuntut agar orang nomor *wahid* di negeri piramida tersebut turun dari jabatannya setelah 30 tahun berkuasa, karena dianggap telah gagal membawahkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Setelah demonstrasi berlangsung selama 18 hari, akhirnya presiden Husni Mubarak

⁹ Ahmad Sahide and others, 'The Arab Spring: Membaca Kronologi Dan Faktor Penyebabnya', *Jurnal Hubungan Internasional*, 4.2 (2015), 118–29 (pp. 120–22).

¹⁰ Mansur Juned, Musa Maliki, and M Asrudin, 'Kekuatan Politik Media Sosial: Uji Kasus Pada Revolusi Mesir 2011', *Global: Jurnal Politik Internasional*, 15.1 (2013), p. 69.

mundur dari jabatannya pada 11 febuari 2011¹¹.

Tumbangnya rezim Bin Ali, Tunisia, lalu kemudian disusul oleh tumbangnya rezim Husni Mubarak, Mesir, fenomena ini nampak memiliki efek domino terhadap negara-negara Arab lainnya. Hal ini dikarenakan negara-negara Arab secara umum memiliki problem yang sama; ekonomi, sosial, dan politik.¹² Maka fenomena arab spring terus berlanjut dari tunisia, mesir, libya, yaman, dan suriah. Di sebgaaian besar negara-negara arab, rakyat dipimpin oleh rezim-rezim yang otoriter, tertutup dan anti kritik. Rezim-rezim tersebut sebagian besar berkuasa selama puluhan tahun, mulai dari Zainal Abidin Bin Ali di Tunisia, Husni Mubarak di Mesir, ali abdullah saleh di yaman, basar asad, suria¹³. Begitu juga dengan yang terjadi di libya, muammar kaddafi yang lebih dikenal dengan kaddafi, telah berkuasa selama 42 tahun sebelum akhirnya jatuh dari kekuasaannya dengan kematian yang tragis¹⁴. Mungkin sudah menjadi takdir sejarah bahwa perubahan-perubahan politik di negara-negara arab harus ditempu dengan jalan paksa, “revolusi”. Rakyat telah menentukan sikapnya untuk membebaskan diri dari rezim-rezim otoriter represif. Menurut Al-

¹¹ Musthafa Abd Rahman, ‘Hosni Mubarak Mundur’, *Kompas*, 2011 <<https://nasional.kompas.com/read/2011/02/12/04005444/hosni.mubarak.mundur?page=all>> [accessed 22 April 2019].

¹² <https://kompas.com/read/2011/01/23/06532377/Robo> h.seperti.Teori.Domino

¹³ Sahide and others.

¹⁴ Machmudi Yon, Riyan Hidayat, and Elia Agustina, *Sejarah Timur Tengah Kontemporer; kepemimpinan di Arab Saudi dan Libya*, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2016), pp. 168–69.

Jabiry, kebebasan berfikir, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan memilih dan mendirikan partai sudah menjadi *ijma'* (kesepakatan) masyarakat arab sejak beberapa dekade yang lalu. Namun, kekuasaan telah membuat para pemimpin mereka melupakannya¹⁵.

Perjalanan demokratisasi di negara-negara Arab memiliki catatan-catatan yang memprihatinkan. Yang jelas, proses tersebut telah menuntut sebuah pengorbanan yang sangat mahal, hal yang paling jelas di depan mata adalah banyaknya nyawa yang berjatuhan. Beberapa tahun proses perubahan di dunia Arab diperkirakan telah merenggut puluhan ribu nyawa manusia baik itu rezim dan anasirnya, pejuang perubahan, rakyat biasa, perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Sehingga menjadi sangat ironis, karena tujuan penting terbentuknya masyarakat dan negara “yang dicita-citakan” adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak bangsanya, bukan justeru sebaliknya. Ibnu Burdah, dosen tetap Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sangat serius melihat dan memperhatikan isu-isu terkini yang sedang berkembang di dunia Arab memprediksi bahwa selain banyaknya korban nyawa, bahwa bila melihat laporan akibat kekerasan yang terjadi di Libya, Suriah, Yaman, Mesir, Tunisia, Yordania dan Sudan, korban terluka akibat proses perubahan tersebut tidak kurang dari satu juta jiwa. Tidak hanya itu saja, kehancuran infrastruktur fisik dan sosial hasil pembangunan dalam waktu yang lama juga terjadi, sehingga yang tidak kalah penting adalah bahwa hancurnya sendi-sendi

¹⁵ Burdah, *Menuju Dunia Arab Baru*, p. 28.

sosial dan kembali menguatnya sentimen kesukuan yang selama ini dijaga¹⁶.

Pasca jatuhnya rezim-rezim otoriter di beberapa negara Arab, mulai dari Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman, stabilitas keamanan tidak dapat dipulihkan langsung, sehingga hal ini berdampak negatif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kebebasan yang tercipta sebab proses demokratisasi yang sedang berlangsung ternyata menimbulkan masalah baru, kontestasi kesukuan dan sekte semakin mengemuka dan menguat. Masing-masing suku dan sekte memperebutkan kemenangan, satu sama lain ingin menang sendiri dengan berbagai cara, bahkan terkadang dengan cara-cara yang tidak bertanggungjawab. Kelompok-kelompok yang sebelumnya menolak demokrasi, justru ikut menggunakan kebebasan tersebut untuk keberhasilan agenda-agenda mereka, bahkan serigkali mereka justru lebih agresif dan lantang bersuara, sehingga sektarianisme menjadi masalah dan tantangan demokrasi pasca Arab Spring di Timur Tengah. Pertanyaannya selanjutnya dari mana akar mula masalah sektarianisme di Timur Tengah, mengapa hingga kini sektarianisme masih menjadi masalah, dan bahkan menjadi penyebab instabilitas di kawasan Timur Tengah?

b. Akar Sektarianisme Berlapis di Timur Tengah.

Sektarianisme yang sedang menggeliat hari ini bukan merupakan fenomena baru di timur tengah. secara sosiohistoris kawasan ini penuh dengan riwayat sektarianisme agama, sosial

budaya dan politik yang berlapis-lapis sejak muncul kristianitas berhadapan dengan yudaisme, ketika yesus kristus dan ajarannya dianggap menyimpang dengan ajaran yahudi. sektarianisme intra agama yahudi terjadi dan berlanjut hingga kini antara yahudi ortodoks dan yahudi reformis. Begitu juga intra kristianitas yang mencakup denominasi yang sangat banyak, khususnya antara abad ke-12 sampai abad ke-17, pasca reformasi gereja yang memunculkan protestanisme. Semangat sektarianisme yang terjadi antara kristianitas dan islam menjadi faktor penting terjadinya sembilan kali perang salib antara 1096 sampai 1272 untuk pembebasan tanah suci dari kekuasaan muslim. Konflik antara muslim dan kaum kristiani juga masih berlanjut di semenanjung Iberia (Spanyol) sejak kekuasaan islam tertangkap sejak 177 yang berakhir lewat *reconquista* oleh gabungan kekuatan Gereja Katolik pada 2 Januari 1492 dengan inkuisisi terhadap umat Muslim dan Yahudi¹⁷.

Sektarianisme antara-Islam juga berkembang sejak masa sahabat Nabi Muhammad ketika Khawarij muncul pada akhir perang *Siffin*, perang antara Ali Bin Abi Thalib dan Muawiyah Bin Abi Sofyan yang berujung pada *Tahkim*, melakkan tindak kekerasan terhadap golongan Islam lainnya yang tidak sependapat dengan mereka. Sejak peristiwa perang *Siffin* dan yang berakhir dengan tahkim umat islam secara tajam terpolarisasi ke dalam kelompok-kelompok. Mereka yang setia kepada Ali disebut Syi'ah, mereka yang setia kepada Muawiyah disebut Sunni, sedangkan kelompok Khawarij

¹⁶ Burdah, *Islam Kontemporer*, pp. 21–22.

¹⁷ Azra, *Transformasi politik Islam*, p. 274.

kemudian melahirkan gerakan-gerakan ekstrem dan radikal seperti al-Qaeda, Boko Haram dan ISIS hingga saat ini¹⁸.

Sektarianisme Sunni-Syi'ah juga muncul dan menguat setelah perang Siffin. Bahkan konflik sektarianisme Sunni-Syi'ah, benih-benihnya telah dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad. Konflik dimulai ketika suksesi kepemimpinan pasca sepinggalan Nabi menganggot Abu Bakar melahirkan faksi antara pengikut setia Ali Bin Abi Thalib dan pengikut setia Abu Bakar. Pengikut setia Ali kemudian dikenal dengan kelompok Syiah, sedangkan pengikut Abu Bakar dikenal sebagai Sunni. Konflik Sunni-Syi'ah ini terus berlanjut dari waktu ke waktu, dan mewarnai perkembangan politik Timur Tengah, terutama pasca kebangkitan Syi'ah yang dipimpin oleh Ayatullah Imam Khomeini dengan melakukan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979¹⁹.

Keberhasilan revolusi Islam Iran 1979 telah membawa banyak pengaruh dan berubahan baik secara sosial, ekonomi, dan politik di dalam negeri *Mullah* tersebut maupun di wilayah Timur Tengah dan bahkan dunia pada umumnya. Revolusi Islam Iran disubut-sebut juga sebagai "salah satu pembontakan rakyat terbesar dalam sejarah umat manusia". Bagi banyak kalangan revolusi Islam Iran merupakan contoh murni Islam politis²⁰. Revolusi ini juga banyak mengangkat isu-isu kebangkitan Islam kontemporer seperti

yang berkaitan dengan keyakinan, kebudayaan, kekuasaan, dan politik, penekanan pada identitas bangsa, keaslian budaya, partisipasi politik, keadilan sosial yang disertai dengan penolakan terhadap pembaratan, otoriterisme pemerintah, dan pembagian kekayaan yang tidak merata.

Meledaknya revolusi Islam Iran telah memberikan pengaruh yang cukup besar di dunia Islam, khususnya di Timur Tengah. Di kawasan Timur Tengah, pengaruh tersebut berupa munculnya apa yang kemudian dikenal sebagai gerakan-gerakan Islam "fundamentalisme", "radikal", "militan", dan "ekstrem". Gerakan ini yang di beberapa negara cenderung "antikemapanan", biasanya disebut juga sebagai "kelompok-kelompok pro-Iran". pengaruh revolusi Islam Iran ini sangat terasa terutama di negara-negara yang memiliki penganut Syi'ah cukup besar seperti di Irak, Lebanon, Bahrain, dan Kuwait²¹.

Menguatnya pengaruh revolusi Islam Iran membawa kekhawatiran di kalangan politisi dan penguasa-penguasa Timur Tengah. kekhawatiran ini dikarenakan adanya narasi untuk mengeksport revolusi Islam Iran ke negara-negara Islam lainnya, khususnya di Timur Tengah. keberhasilan revolusi Islam Iran seolah memiliki dua sisi yang berbeda, disisi lain sebagian kalangan menganggapnya sebagai contoh dan inspirasi untuk menciptakan perubahan besar dan melepaskan diri dari belenggu rezim-rezim otoriter dan pengaruh Barat. Namun sebagian yang lain melihatnya sebagai ancaman, bahkan

¹⁸ Hakim, p. 57.

¹⁹ Sahide, 'Konflik Syi'ah-Sunni Pasca-The Arab Spring', p. 315.

²⁰ John L Esposito and John Obert Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan Prospek* (Penerbit Mizan, 1999), p. 66.

²¹ M. Riza Sihbudi, *Islam, Dunia Arab, Iran, Bara Timur Tengah*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1991), p. 191.

sebagai sebab dari instabilitas di kawasan Timur Tengah serta menjadi momok tersendiri bagi Barat.

Benar saja, bahwa kekhawatiran elite-elite dan rezim penguasa Timur Tengah atas semakin menguatnya pengaruh revolusi Islam Iran yang diklaim sebagai arus besar Syi'ah di kawasan tersebut, telah melahirkan dan semakin mempertajam sentimen sektarianisme Sunni-Syi'ah di kawasan Timur Tengah. Semakin meruncingnya sentimen sektarianisme Sunni-Syi'ah yang melibatkan para elite dan aktor-aktor besar Arab, juga memperparah kondisi instabilitas di kawasan tersebut. Instabilitas yang disebabkan oleh sektarianisme juga mempengaruhi arah perubahan baru negara-negara Timur Tengah. Arah perubahan baru yang dicita-citakan dan diperjuangkan oleh banyak kalangan, agar mendapatkan kebebasan, keadilan, kesejahteraan dengan sistem politik yang lebih demokratis melalui Arab Spring pengorbanan yang mahal, justru semakin pudar dan hilang bersama dengan menguatnya sentimen sektarianisme. Kawasan Timur Tengah telah mengalami kekacauan besar bersamaan dengan terjadinya gelombang Arab Spring yang dimulai dari Tunisia, namun kekacauan ini semakin diperparah dengan kontestasi agresif antar golongan yang didasarkan atas sentimen mazhab dan sekte keagamaan. yang seringkali dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab, bahkan terkadang hingga menghalalkan segala cara.

Konflik dan perang saudara yang terjadi di Yaman dan masih berlangsung hingga saat ini, merupakan salah satu contoh dari warna konflik sektarianisme

yang masih eksis dan terus menguat dari waktu ke waktu di kawasan Timur Tengah. gerakan dan gelombang demonstrasi yang mendesak rezim Yaman, Ali Abdullah Saleh, untuk mundur dari jabatannya akhirnya menyisakan instabilitas dan konflik yang berlarut-larut yang tidak diketahui kapan akan berakhir. Desakan rakyat Yaman terhadap Ali Abdullah Saleh bukan tanpa alasan, pasalnya selain sejak 1978 memimpin rakyat telah merasakan aroma tidak sehat dalam kepemimpinannya: ketidakadilan, korupsi, dan nepotisme menjadi warna kontras di lingkungan istana. kondisi ini juga semakin diperparah oleh kesewenang-wenangan dan diskriminasi Abdullah Saleh yang notabene Sunni kepada kelompok Islam Syi'ah dalam banyak hal: distribusi kekuasaan, perekrutan militer, pendidikan, hingga menutup peluang kelompok Syi'ah dalam pemerintahan²².

Kondisi Yaman hari ini tidak dapat dipisahkan dari masalah konflik sektarianisme. Konflik sektarianisme telah membuat negara ini menjadi "negara boneka" dan ladang *proxy war* dari kekuatan-kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan untuk menancapkan pengaruhnya di Yaman²³. Intervensi Arab Saudi dan negara-negara GCC (*Gulf Cooperation Council*) yang didukung oleh Amerika untuk mendukung dan mempertahankan kekuasaan Abdullah Saleh yang Sunni ikut mengundang reaksi Iran untuk

²² Fatkurrohman, *Isu Dan Realita Konflik Kawasan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), pp. 5–6.

²³ Ah Fawaid, "Yaman Pasca Al-Rabî Al-Arabî: "Musim Semi Gerakan Islamisme" Dan "Negara Gagal", *Istiqro*, 15.02 (2017), 323–50 (p. 323).

memberikan dukungan terhap oposisi Houthi yang memiliki kesamaan afiliasi sekte dan mazhab. Intervensi Arab Saudi dan Iran dalam konflik internal Yaman memperlihatkan kompetisi dan persaingan tajam keduanya dalam memperebutkan eksistensi hegemoni di kawasan Timur Tengah²⁴. Kompleksitas masalah yang dihadapi Yaman: ekonomi, sosial, politik, keamanan, intervensi eksternal, dan sektarianisme, membuat Yaman menjadi negara labil, untuk tidak mengatakan negara gagal, melihat masa depan Yaman sebagai negara demokratis seolah seperti negara “hidup segan mati tak mau”.

c. Dinamika Demokrasi di Timur Tengah; Antara Tantangan dan Peluang.

Demokrasi liberal, paling tidak dalam arti pemilihan umum dan jaminan HAM, pasca Perang Dingin saat ini, menurut Fukuyama dalam bukunya *The And of Historys the Last Man*, merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang bertahan dan lebih dekat pada sifat manusia. Hal ini karena tujuan agung demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia, dan adanya korelasi yang tinggi antara demokrasi dengan kesejahteraan (menawarkan jalan keluar dari kemiskinan), dua hal yang dalam sejarah manusia diperjuangkan secara kontan. Maka wajar jika demokrasi menjadi pilihan bagi negara-negara dunia, seperti yang dikatakan samuel P. Huntington saat ini sedang berlangsung

²⁴ Ahmad Fanani, ‘Rivalitas Arab Saudi-Iran Di Yaman Era Arab Spring 2010-20116’, *Diss. FISIPOL UMY*, 2016, p. 14.

gelombang demokratisasi ke tiga di dunia²⁵.

Islam adalah agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Timur Tengah. sehingga peran dan pengaruh Islam terhadap arah baru politik di kawasan tersebut menjadi isu yang relevan untuk melihat situasi dan kondisi kontemporer. Melihat fenomena yang ada, pengaruh Islam sebagai sumber pertimbangan dan aktivitas politik masih eksis dan terus berlangsung di Timur Tengah. berdebatan antara syari’at Islam dan sistem demokrasi masih berlanjut, dan bahkan kontestasi sunni dan syiah selalu mewarnai perkembangan politik dari level negara hingga regional kawasan timur tengah²⁶. Selanjutnya yang menjadi pertanyaannya mendasar untuk melanjutkan analisis ini adalah apakah islam dan demokrasi *compatible*? Jawaban dari pertanyaan ini tentu tidak akan tunggal.

Peristiwa penghancuran gedung WTC dan markas militer Amerika serikat, ditambah lagi dengan kompleksitas masalah-masalah yang dihadapi negara-negara Islam khususnya Timur Tengah dalam melakukan transisi demokrasi, memperkuat pandangan barat bahwa Islam dan demokrasi sebagai produk barat tidak bisa disandingkan. Hal ini juga menjadi justifikasi tesis Huntington, *The Clash of Civilization*, bahwa benturan antara Islam dan Barat

²⁵ Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*, cet. 1 (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Perkasa, 2002), p. 40.

²⁶ Arief Bakhtiar Darmawan, ‘Islam Dan Perilaku Politik Di Timur Tengah’, *Insignia Journal of International Relation*, 05.01 (2018), 46–57 (p. 56).

sebagai pengganti benturan kapitalisme dan komunisme. Juga membenarkan pendapat simplikatif beberapa intelektual barat seperti Adda Bozeman yang melihat bahwa kultur Islam tidak dibimbing oleh ide-ide kebenaran, atau Max Stackhouse yang mengklaim islam sebagai tradisi agama yang tidak sesuai dengan konsepsi demokrasi. Bahkan hal yang sama datang dari tokoh dan teoritis Islam, seperti Ali Benhadj dan Sayyid Qutb, yang juga memberikan legitimasi bahwa Islam dan demokrasi tidak *compatible*. Demikian juga yang diyakini oleh Lary Diamond dan Juan Linz tentang kultur politik, bahwa dunia Islam tidak dapat diharapkan bisa melakukan proses transisi ke demokrasi²⁷.

Bila memperhatikan fenomena yang ada, sikap skeptis tersebut cukup beralasan mengingat negara-negara Islam khususnya di Timur Tengah telah gagal dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya terkait kebebasan, kesetaraan, penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan ekonomi karena hal ini merupakan esensi demokrasi. Diperparah lagi dengan menguatnya sentimen kesukuan, kelompok, agama, mazhab dan sekte yang melahirkan kebijakan-kebijakan penguasa dan elit-elit negara yang tidak berkeadilan sehingga memantik lahirnya konflik-konflik sektarianisme tidak berujung yang menjadi penyebab instabilitas sekaligus batu sandungan dan menghambat proses transisi demokrasi di negara-negara timur tengah.

Dalam perkembangan pemikiran politik Islam terkait dengan sistem

²⁷ Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban*, p. 40.

politik demokrasi, kalangan ulama, intelektual dan aktivis muslim memiliki respon dan kecenderungan yang beragam. Paling tidak, respon terhadap sistem politik demokrasi, melahirkan tiga kelompok, di antaranya: *pertama*, mereka adalah kelompok yang melihat bahwa islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda. Demokrasi merupakan produk barat, barat bukan islam, sehingga demokrasi tidak dapat dijadikan acuan oleh umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. salah satu dari mereka adalah Taqiy Al-Din An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. *Kedua*, kelompok yang memandang islam berbeda dengan demokrasi. Mereka tetap mengakui adanya prinsip demokrasi dalam Islam, namun di saat yang sama juga tidak menafikan adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi. Salah satu tokoh di dalamnya adalah Abu Al-A'la Al-Maududi. *Ketiga*, mereka adalah kelompok yang mengklaim bahwa islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Mereka melihat bahwa Islam sebagai sebuah sistem nilai senafas dengan prinsip-prinsip demokrasi: keadilan, kesetaraan, kebebasan, musyawarah, dan sebagainya²⁸.

Untuk melihat kompatibilitas islam dan demokrasi ini sangat bergantung pada pemahaman dan penafsirannya seseorang terhadap Islam itu sendiri. Mereka yang melihat Islam sebagai ajaran dan doktrin yang *rigid*, tertutup dan tidak bisa dirubah lagi, maka jawabannya akan negatif. Berbeda

²⁸ Masykuri Abdillah and Wahid Wahab, *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, cet. 1 (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), p. 07.

dengan mereka yang melihat islam sebagai agama dengan ajaran dan nilai-nilai universal yang dinamis, terbuka dengan perubahan yang terus berkembang, dan dapat menerima penafsiran-penafsiran baru, maka jawabannya Islam dan Demokrasi adalah dua entitas yang kompatibel. Dalam konteks ini, penulis meyakini bahwa Islam kompatibel, dan dapat bersanding dengan demokrasi. Islam sebagai agama dan sistem nilai *shahih li kulli zaman wal makan*.

Islam memiliki nilai-nilai dasar yang juga terkandung dalam sistem demokrasi: *al-musawah* (kesetaraan), *al-hurriyah* (kebebsaan), *al-ukhuwwah* (persaudaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-shura* (musyawarah), dan *al-mas'uliyat* (pertanggungjawaban). Tentang hak-hak yang usahan oleh pribadi, masyarakat dan negara meliputi: *hifz al-din* (hak beragama), *hifz al-nafs* (hak hidup), *hifz al-maal* (hak milik pribadi), dan *hifz al-'irdh* (hak mempertahankan nama baik)²⁹. Pada akhirnya, seperti ditegaskan oleh Ronald Inglehart dan Pippa Norris, dunia Islam dan Barat sebenarnya sama-sama mendukung demokrasi. Dalam bahasa Samsu Rizal Pangabean, sama sekali tidak ada masalah bagi seorang untuk menjadi muslim di satu sisi dan menjadi demokratis di sisi lain³⁰.

Perkembangan demokrasi di dunia Islam khususnya Timur Tengah cukup lambat, transisi menuju demokrasi tidak berjalan dengan baik

²⁹ Ali Mutakin, 'ISLAM DAN DEMOKRASI: Kajian Fikih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan', *Jurnal Al-Ashriyyah*, 01 (2016), 25–42 (pp. 32–33).

³⁰ Muhammad Adib and Nur Qomari, 'Arus Baru Politik Islam: Pluralisme, Kontestasi, Dan Demokratisasi', *Maqashid*, 1.2 (2018), 18–33 (p. 20).

dan masih akan butuh waktu untuk memperbaiki kondisi yang ada, akan tetapi ini semua bukan semata-mata persoalan islam sebagai agama akan tetapi minimal ada lima faktor penting yang menghambat pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi di negara-negara Islam khususnya di Timur Tengah. *Pertama*, kelemahan dalam infrastruktur dan masyarakat. Sebagaimana besar negara timur tengah terbelakang dalam ekonomi dan pendidikan. *Kedua*, masih kuatnya pandangan normatif-teologis tentang hubungan agama (*din*) dan negara (*dawlah*). Perdebatan tentang arah implementasi politik Islam masih berlangsung, antara yang menginginkan eksperimen “negara islam” (*dawlah islamiyyah*), dan *khilafah* (kekhilafahan universal). *Ketiga*, dominasi kultur politik tradisional yang berpusat kepada kepemimpinan keagamaan karismatik yang ditaklidi secara buta oleh sebagian umat muslim. *Keempat*, kegagalan negara-negara Islam yang telah mengadopsi demokrasi untuk mempraktekkan demokrasi secara genuin dan otentik. Seringkali rezim yang mengaku demokreasi namun mengambil kebijakan dan menyelesaikan masalah dengan cara-cara tidak demokratis. *Kelima*, lemah atau tidak berfungsinya *civil society*. Sebagian besar masyarakat tidak dapat memainkan peran instrumennya dalam pertumbuhan demokrasi, hal ini bisa saja karena mereka telah dikooptasi negara atau mengalami disfungsi dan disorientasi karena keterlibatan mereka dalam politik praktis³¹.

³¹ Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban*, pp. 48–50.

Bila melihat negara-negara di timur tengah, secara kelembagaan, pada umumnya telah memiliki lembaga-lembaga dan simbol demokrasi, seperti partai politik, pemilihan umum, dan perwakilan rakyat. Namun rangkaian pelaksanaan demokrasi masih memiliki banyak catatan. Lebanon, Irak dan Palestina telah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan aspirasi, namun tetap dengan catatan. Di Lebanon, kebebasan rakyat telah “dibajak” oleh para elit politik dengan sistem konsosiasional (*sharing* kekuasaan antar kelompok). Di Irak, proses politik masih diwarnai dengan masalah sektarianisme. Begitu juga di Palestina, proses demokrasi yang mulai tumbuh kembali diganggu oleh pihak luar seperti Amerika, Uni Eropa, Israel dan negara-negara Arab yang pro-Barat. Bahrain dan Kuwait juga telah memiliki lembaga perwakilan rakyat, namun esensi lembaga ini bukan representasi perwakilan rakyat sebab sebagian besar yang memilih bukan rakyat melainkan raja. Di Aljazair, Sudan, Tunisia dan Mesir telah menerapkan sistem multipartai, namun pada saat yang sama partai-partai politik dibonsai sehingga tidak dapat berkembang dan berkompetisi dengan partai pemerintah³².

d. Realisasi demokrasi di negara-negara Timur Tengah pasca-Arab Spring.

Setelah berjalan delapan tahun semenjak bergulirnya pada awal 2011, Arab Spring masih menyisakan banyak problem, kemerosotan ekonomi, minimnya lapangan kerja,

meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, Timur Tengah juga masih terjebak dalam konflik dan perang saudara akibat kepentingan-kepentingan sektarian: suku, etnis, agama, mazhab, dan kelompok politik. Transisi menuju demokrasi yang dicita-citakan tidak berjalan dengan baik, demokrasi masih sebatas cita-cita dan mimpi yang indah bagi sebagian besar masyarakat Arab khususnya Timur Tengah. Implementasi demokrasi bukan sesuatu yang mudah bagi negara-negara Timur Tengah, namun bukan berarti Timur Tengah tidak dapat menjalankan sistem demokrasi. Negara-negara Timur Tengah masih butuh waktu lebih untuk menyesuaikan diri dengan demokrasi.

Alam demokrasi di negara-negara Timur Tengah masih layu, masing-masing sedang menghadapi masalahnya sendiri. Namun proses dan progres terus diupayakan di beberapa negara, dalam hal ini khususnya di Tunisia. Tunisia menjadi asa bagi negara-negara Islam di Timur Tengah untuk bangkit dari keterpurukan panjang. Sejak Arab Spring 2010 bergulir, belum nampak tanda-tanda yang memberikan tumbuh suburnya demokrasi secara substantif. Namun Tunisia menjadi sebuah pengecualian, dari Tunisia di mulai gelombang besar Arab Spring sebagai simbol jatuhnya rezim-rezim otoriter, dan dari Tunisia pula harapan untuk bangkit dan menunjuk alam demokrasi itu di mulai. Setelah jatuhnya rezim bin Ali, Tunisia telah berhasil melangsungkan pemilu secara damai dan kontestasi politik di antara partai-partai yang ada berlansung kompetitif. Tidak ada monopoli kekuasaan pada individu, dan partai-partai politik bersaing untuk

³² Burdah, *Menuju Dunia Arab Baru*, pp. 27–28.

mendapatlan simpati publik, bahkan berbeda dan lebih maju dari negara-negara Timur Tenga lain, di Tunisia kaum perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam ranah politik praktis.

Sebelum terjadi Arab Spring, Tunisia mengadopsi demokrasi *electoral*, presiden dipilih melalui mekanisme pemilu dengan masa jabatan lima tahun. Akan tetapi setiap kali pemilu Zainal Abidin bin Ali kerap terpilih sebagai presiden, hal ini tidak lepas dari dukungan partai *Constitutional Democratic Party* yang menguasai lebih 80% kursi di parlemen. Kelompok aktivis dan oposisi selalu mendapatkan pengawasan ketat oleh rezim sehingga tidak mudah berkembang, hal ini juga mengakibatkan lemahnya partisipasi publik dalam dinamika sosial politik di Tunisia. Setelah Arab Spring dan bin Ali jatuh, partai-partai politik mulai bermunculan. Setidaknya terdapat empat partai yang mendominasi peta politik di Tunisia di antaranya *An-Nahdhah*, *The Congress For the Republic*, *Ettakatol*, dan *Modernist Democratic Pole and Demokratic Progress Party*. Saat ini an-nahdhah menjadi partai Islam populer dan mendominasi mayoritas suara, dan disusul dengan partai-partai lainnya³³.

Tunisia terus bangkit dan memperbaiki diri, Januari 2014 Majelis Nasional Tunisia menyetujui konstitusi baru negara. Pengesahan konstitusi ini merupakan langkah maju untuk

membangun demokrasi di Tunisia setelah tiga tahun jatuhnya rezim bin Ali. Konstitusi baru tersebut dianggap sebagai impian rakyat Tunisia, bukti kebangkitan revolusi dan akan menciptakan bangsa sipil demokratik. Persetujuan konstitusi dan kemajuan membuat Tunisia kontras dengan kondisi negara-negara lain di kawasan yang sedang mengalami transisi pasca-Arab Spring. Libya, Mesir, Suriah dan Yaman masih terus bergulat dengan konflik internalnya masing-masing setelah revolusi 2011. Pengesahan konstitusi baru tersebut membuat Tunisia menjadi negara paling progresif di kawasan Konstitusi berisi tentang jaminan kesamaan hak bagi pria dan wanita, menuntut negara mengatasi masalah korupsi, pembagian kekuasaan eksekutif antara perdana menteri dan presiden³⁴.

Akhir-akhir ini, kita mendengar banyak perubahan besar terkait eksistensi wanita di dunia Arab. Perubahan paling kasat mata adalah Arab Saudi baru-baru ini memberikan kebebasan dan kesempatan bagi kaum perempuan untuk eksis di ruang-ruang publik: izin mengemudi, nonton di bioskop, masuk tradion, dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui, Tunisia adalah negara yang paling maju dalam hal feminisme. Sejak awal merdeka dari Prancis, 13 Agustus 1956, Tunisia telah mengundang kesamaan hak antara pria dan wanita. Sejak saat itu, 13 Agustus di peringati menjadi hari

³³ Muhammad Fakhry Ghafur, 'Agama Dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya', *Jurnal Penelitian Politik*, 11.2 (2016), 16 (p. 89).

³⁴ Zaky Al Hamzah, 'Konstitusi, Sejarah Baru Tunisia', *Republika*, 2014 <<https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/27/n02b9d-konstitusi-sejarah-baru-tunisia>> [accessed 22 April 2019].

perempuan nasional di Tunisia³⁵. Pada Juli 2018, demokrasi Tunisia menorehkan sejarah baru dalam perpolitikan, Souad Abderrahim terpilih menjadi perempuan pertama untuk menjabat sebagai walikota Tunis setelah menang dengan perolehan 33,8% suara mengalahkan rivalnya Kamel Idir dari partai sekuler, Dina Tounes, dengan perolehan 26 suara. Menariknya, Souad diusung oleh partai Annahda, partai islam yang selama ini beraliran konservatif. Annahda mampu melakukan terobosan dan membaca realitas politik di Tunisia. Annahda berhasil mengukuhkan diri sebagai partai “islam demokratis” dengan mendorong kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki³⁶. Pada 2017 Tunisia mengizinkan wanita muslim menikah dengan pria non-muslim. Pada Agustus 2018, presiden Tunisia Beji Caid Assebsi mengusulkan persamaan warisan antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan mendapatkan hak waris yang sama dengan laki-laki, yang dalam ajaran formal hukum Islam (*fiqih*) laki-laki mendapatkan hak waris dua kali lipat dari bagian perempuan. Tunisia adalah negara yang telah memberikan perempuan hak lebih dari negara-negara muslim lain di kawasan timur tengah³⁷.

³⁵ George Junior, ‘Tunisia, Pionir Feminisme Di Dunia Arab’, *Kumparan*, 2018 <<https://kumparan.com/george-junior/tunisia-pionir-feminisme-di-dunia-arab-27431110790544654>> [accessed 22 April 2019].

³⁶ Zuhairi Misrawi, ‘Sejarah Baru Demokrasi Tunisia’, *Detik*, 2018 <<https://news.detik.com/kolom/d-4099965/sejarah-baru-demokrasi-tunisia>> [accessed 22 April 2019].

³⁷ Marniati, ‘Presiden Tunisia Usul Persamaan Warisan Bagi Perempuan’, *Republika*, 2018 <<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/08/14/pdfj4r366-presiden-tunisia-usul-persamaan-warisan-bagi-perempuan>> [accessed 22 April 2019].

Tunisia adalah harapan dan inspirasi bagi negara-negara muslim di timur tengah untuk segera kembali berbenah dan bangkit dari keterpurukan, konflik sektarian berkepanjangan, dan perang saudara. Demokrasi memang membutuhkan waktu untuk tumbuh dengan baik di Timur Tengah. demokrasi Barat yang dikarakteristikan dengan adanya pemisahan kekuasaan, pemilu yang bebas, kebebasan warga sipil, hukum, penghargaan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan toleransi beragama, merupakan nilai yang sepenuhnya baru bagi negara-negara di Timur Tengah. Menerapkan demokrasi secara penuh merupakan prosesi kompleks, apa lagi bagi Timur Tengah demokrasi merupakan konsep yang masih abstrak³⁸. Namun meski bukan hal mudah, Timur Tengah sedang dalam proses menuju pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Tunisia telah berupaya membuktikannya dengan berhasil menyelenggarakan pemilu dengan baik, memberikan kebebasan berpendapat, dan menjaga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Demokrasi bisa tumbuh dan berkembang di dengara manapun termasuk di negara-negara Timur Tengah, akan tetapi corak Implementasi demokrasi tidak mesti sama dengan Barat, karena masing-masing negara memiliki budaya yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Proses Demokrasi dapat berkembang sesuai dengan budaya masing-masing negara.

³⁸ Shafira Elnanda Yasmine, ‘Arab Spring: Islam Dalam Gerakan Sosial Dan Demokrasi Timur Tengah’, *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28.2 (2016), 106–13 (pp. 110–11).

Demi menciptakan alam demokrasi, Timur Tengah semestinya bisa lebih terbuka dan berani untuk belajar dari negara-negara Islam lainnya yang telah berhasil menerapkan demokrasi. Timur tengah seharusnya berjiwa besar untuk mengakui bahwa mereka memiliki segudang permasalahan: keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, dan pembangunan peradaban nyaris sulit ditemukan dalam praktis kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Juga berani melihat dan menyadari realitas bahwa mereka tidak lagi memiliki kejayaan sebagaimana di masa lampau, sehingga berani untuk menghadapi kenyataan dan menuju arah Arab baru dari peradaban dunia Arab³⁹.

Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki nilai-nilai dan pengalaman yang sangat berharga terkait kemajemukan, mengelola konflik, Islam dan demokrasi. Indonesia adalah negara yang majemuk, memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Hal ini bukan berarti Indonesia tidak terhindar dari konflik. Indonesia juga menghadapi gesekan-gesekan konflik, akan tetapi yang menarik adalah Indonesia selalu mampu mengelola konflik dengan baik sehingga tidak berkepanjangan. Indonesia juga memiliki pengalaman transisi ke demokrasi dari pemerintahan otoriter, dan mampu membuktikan bahwa Islam dan demokrasi kompetibel. Sehingga dengan demikian, negara-negara Muslim di Timur Tengah, sepatutnya belajar dan mencontoh Indonesia untuk

menghadapi tantangan dan ujian zaman yang sedang mereka hadapi saat ini.

Timur Tengah dapat belajar dan mencotok dua hal dari Indonesia yaitu Pancasila dan Islam yang moderat. Pancasila merupakan asas dasar dan nilai bersama yang dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. di dalam mencakup nilai-nilai universal yang dapat dijadikan titik temu (*meeting poin*) bersama terkait, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kepemimpinan dan keadilan sosial. Dengan titik temu ini keragaman dan kemajemukan dapat dikelola dengan baik, sehingga kemajemukan tidak lagi menjadi sumber bencana, pertikaian, konflik, dan perang. Justeru sebaliknya mampu mengelola kemajemukan sebagai ciri khas, identitas, dan bahkan kekuatan sebuah bangsa. Hal inilah yang harus ditemukan oleh negara-negara timur tengah, menggali nilai-nilai dasar dari budaya mereka sehingga dapat dijadikan titik temu (*meeting poin*) yang dapat dijadikan landasan dalam kehidupan sosial, agama, bangsa dan negara.

Praktis keislaman di Indonesia adalah Islam moderat (*Islam Washatiyyah*). Islam yang dibangun diatas nilai-nilai budaya, menjunjung tinggi inklusivime dan pluralisme. Atau secara sederhana Islam moderat dimaknai sebagai Islam yang akomodatif, toleran, nirkekerasan, terbuka dan berkembang. Islam moderat telah membawa umat Islam Indonesia mampu untuk hidup berdampingan dengan suku, budaya dan agama apapun. Islam moderat juga telah mampu menjadikan umat Islam terbuka dan menerima demokrasi serta mampu menjalankannya dengan baik. Hal yang tidak kalah penting adalah Islam

³⁹ Burdah, *Menuju Dunia Arab Baru*, p. 146.

moderat berhasil buat umat Islam Indonesia untuk tidak terjebak dalam konflik sektarian Sunni-Syi'ah, sebagaimana yang dialami oleh negara-negara Timur Tengah hari ini. Agama Islam memang datang pertama kali di negara Arab, akan tetapi secara praktis, baik pemikiran, perilaku sosial dan politik Indonesia lebih mendekati substansi ajaran Islam. Sehingga semikian Timur Tengah harus belajar Islam moderat dari Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan demokrasi di negara-negara Timur Tengah bukanlah sesuatu yang mudah, proses transisi demokrasi tidak berjalan dengan baik. Setelah berjalan delapan tahun semenjak bergilirnya pada awal 2011, Arab Spring masih menyisakan banyak masalah, Timur Tengah masih terjebak dalam konflik dan perang saudara akibat kepentingan sektarian. Secara sosio-historis konflik sektarianisme di Timur Tengah memiliki akar berlapis-lapis dalam kurun waktu yang panjang. Konflik sektarianisme Sunni dan Shi'ah telah dimulai sejak awal Islam. Sektarianisme telah menjadi salah satu penyebab instabilitas di kawasan Timur Tengah, konflik sektarianisme, khususnya konflik Sunni dan Shi'ah, telah memberikan pengaruh besar terhadap wajah baru perkembangan peradaban negara-negara di Timur Tengah. Tensi konflik sektarianisme pasca terjadinya Arab Spring telah mewarnai dinamika dan gejolak politik di kawasan. Bahkan konflik sektarianisme telah menjadi batu sandungan dari transisi demokrasi di Timur Tengah.

Kompleksitas proses dan dinamika perjalanan demokrasi di Timur Tengah bukan menjadi alasan untuk meragukan kompatibilitas Islam dan demokrasi. Islam sebagai agama, secara nilai dan ajaran pada dasarnya selaras memperjuangkan nilai-nilai kebebasan, persamaan, hak asasi manusia, keadilan dan kemanusiaan. Sikap skeptis Barat yang meragukan kompatibilitas Islam dan demokrasi adalah hal yang wajar bila melihat fenomena dan perkembangan baru dunia Arab hari ini yang gagal dalam transisi ke demokrasi. Keraguan tersebut tidak saja datang dari Barat, perkembangan pemikiran politik Islam juga melahirkan minimal dua pemikiran terkait kompatibilitas Islam dan demokrasi: mereka yang menolak demokrasi dan menerima demokrasi.

Meski di beberapa negara Timur Tengah proses demokratisasi masih berada dalam ketidakpastian, namun tidak dengan Tunisia. Tunisia justru menjadi asa bagi negara-negara Timur Tengah untuk bangkit dari keterpurukan. Dari Tunisia gelombang tuntutan demokratisasi dimulai, dan dari Tunisia pula harapan demokrasi itu mulai tumbuh. Sejak bergulirnya gelombang Arab Spring awal 2011 dan menjatuhkan rezim otoriter Zainal Abidin bin Ali, Tunisia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk mengangkat seorang pemimpin secara demokratis. Demokrasi Tunisia semakin membaik dengan diresmikannya konstitusi baru yang memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga Tunisia menjadi pionir feminisme di Timur Tengah.

Timur Tengah dapat belajar pada negara-negara Muslim yang telah berhasil menjalankan demokrasi dan dapat mengelola konflik sektarianisme dengan baik. Dalam hal ini, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara Timur Tengah, selain menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga telah berhasil menjalankan demokrasi. Dua hal penting yang dapat dicontoh oleh negara-negara Timur Tengah dari Indonesia adalah Pancasila dan penguatan Islam moderat. Pancasila sebagai nilai dasar merupakan titik temu dari keragaman dan kemajemukan suku, etnis, budaya, dan agama. Penguatan Islam moderat sangat penting, Islam yang inklusif, toleran, akomodatif, nirkekerasan, terbuka dan berkembang sehingga tidak mudah terjebak dalam konflik-konflik sektarianisme, khususnya konflik Sunni-Syi'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, and Wahid Wahab, *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, cet. 1 (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999)
- Adib, Muhammad, and Nur Qomari, 'Arus Baru Politik Islam: Pluralisme, Kontestasi, Dan Demokratisasi', *Maqashid*, 1.2 (2018), 18–33
- Al Hamzah, Zaky, 'Konstitusi, Sejarah Baru Tunisia', *Republika*, 2014
<<https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/27/n02b9d-konstitusi-sejarah-baru-tunisia>> [accessed 22 April 2019]
- Azra, Azyumardi, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*, cet. 1 (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Perkasa, 2002)
- , *Transformasi politik Islam: radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*, Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group bekerja sama Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)
- Burdah, Ibnu, *Islam Kontemporer: Revolusi dan Demokrasi*, cet. I (Malang: Intrans Publishing, 2014)
- , *Menuju Dunia Baru Arab: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, Dan Kekuasaan*, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013)
- Darmawan, Arief Bakhtiar, 'Islam Dan Perilaku Politik Di Timur Tengah', *Insignia Journal of International Relation*, 05.01 (2018), 46–57
- Esposito, John L, and John Obert Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan Prospek* (Penerbit Mizan, 1999)
- Fanani, Ahmad, 'Rivalitas Arab Saudi-Iran Di Yaman Era Arab Spring 2010-20116', *Diss. FISIPOL UMY*, 2016
- Fatkurrohman, *Isu Dan Realita Konflik Kawasan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Fawaid, Ah, 'Yaman Pasca Al-Rabî Al-Arabî: "Musim Semi Gerakan Islamisme" Dan "Negara Gagal"', *Istiqro*, 15.02 (2017), 323–50
- Ghafur, Muhammad Fakhry, 'Agama Dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya', *Jurnal Penelitian Politik*, 11.2 (2016), 16
- Hakim, Abdul, 'Konflik Sektarian Dan Perkembangan Pemikiran Dalam Islam', *SAFINA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1.1 (2016), 56–60

- Juned, Mansur, Musa Maliki, and M Asrudin, 'Kekuatan Politik Media Sosial: Uji Kasus Pada Revolusi Mesir 2011', *Global: Jurnal Politik Internasional*, 15.1 (2013)
- Junior, George, 'Tunisia, Pionir Feminisme Di Dunia Arab', *Kumparan*, 2018 <<https://kumparan.com/george-junior/tunisia-pionir-feminisme-di-dunia-arab-27431110790544654>> [accessed 22 April 2019]
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cet. VI (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Marniati, 'Presiden Tunisia Usul Persamaan Warisan Bagi Perempuan', *Republika*, 2018 <<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/08/14/pdfj4r366-presiden-tunisia-usul-persamaan-warisan-bagi-perempuan>> [accessed 22 April 2019]
- Misrawi, Zuhairi, 'Sejarah Baru Demokrasi Tunisia', *Detik*, 2018 <<https://news.detik.com/kolom/d-4099965/sejarah-baru-demokrasi-tunisia>> [accessed 22 April 2019]
- Mutakin, Ali, 'ISLAM DAN DEMOKRASI: Kajian Fikih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan', *Jurnal Al-Ashriyyah*, 01 (2016), 25–42
- Rahman, Musthafa Abd, 'Hosni Mubarak Mundur', *Kompas*, 2011 <<https://nasional.kompas.com/read/2011/02/12/04005444/hosni.mubarak.mundur?page=all>> [accessed 22 April 2019]
- Sahide, Ahmad, *Gejolak Politik Timur Tengah (Dinamika, Konflik dan Harapan)*, cet. I (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017)
- , 'Konflik Syi'ah-Sunni Pasca-The Arab Spring', *Jurnal Kawistara*, 3.3 (2013)
- Sahide, Ahmad, Syamsul Hadi, Siti Muti'ah Setiawati, and Bambang Cipto, 'The Arab Spring: Membaca Kronologi Dan Faktor Penyebabnya', *Jurnal Hubungan Internasional*, 4.2 (2015), 118–29
- Sihbudi, M. Riza, *Islam, Dunia Arab, Iran, Bara Timur Tengah*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1991)
- , *Menyandera Timur Tengah*, Cet. 1 (Jakarta : Ujungberung, Bandung: Mizan ; Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2007)
- Yasmine, Shafira Elnanda, 'Arab Spring: Islam Dalam Gerakan Sosial Dan Demokrasi Timur Tengah', *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28.2 (2016), 106–13
- Yon, Machmudi, Riyan Hidayat, and Elia Agustina, *Sejarah Timur Tengah Kontemporer; kepemimpinan di Arab Saudi dan Libya*, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2016)